

SINOPSIS

Sebagai Negara demokrasi, masing-masing lembaga yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan yang mandiri, meskipun diantara lembaga-lembaga tersebut masih ada keterkaitan dan dianjurkan untuk saling mendukung dan bekerjasama. DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah diharapkan dapat melepaskan diri dari intervensi kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai konsekuensinya secara eksplisit adanya pemberian wewenang kepada daerah otonom Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten dan DPRD tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penilaian Kinerja Lembaga DPRD dianggap penting untuk dilakukan karena selain sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama sebagai penentu kebijakan di daerah juga menjelaskan kemampuan DPRD dalam mengoptimalkan fungsinya dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah.

Penelitian dilakukan di kawasan Kabupaten Kaur dengan permasalahan perihal DPRD Kabupaten Kaur, hal tersebut untuk mempelajari sejauh mana Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan tahun 2011-2012 (dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas). Selain itu, peneliti juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2011-2012. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber dan telaah sumber literatur berdasarkan analisa kualitatif.

Secara umum, kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam melakukan kontrol terhadap APBD dan PERDA serta keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Kaur belum begitu optimal. Wawancara diambil dari tokoh masyarakat di Kabupaten Kaur dan didukung dengan fakta-fakta yang ada di DPRD. Hal ini juga ditunjukkan dari beberapa aspek penilaian: (1) akuntabilitas, dari pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap APBD dan PERDA belum mampu menjawab keresahan yang ada di masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; (2) responsivitas, kemampuan DPRD untuk lebih tanggap terhadap kebijakan PERDA yang dikeluarkan Eksekutif dan kondisi yang berkembang serta apa yang menjadi prioritas untuk ditangani belum sesuai dengan harapan masyarakat; (3) responsibilitas, pengawasan masih sangat rendah, dikarenakan belum adanya kemandirian dari anggota DPRD sehingga belum adanya output yang dihasilkan oleh DPRD, khususnya tentang PERDA yang selalu mendukung kebijakan Eksekutif karena pada umumnya inisiatif DPRD masih minim.

Dari kendala yang ada itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti didalam penyerapan informasi yang diterima DPR belum baik dan masih tergantung dari individu masing-masing Dewan, serta masih tergantung pada sosial kontrol masyarakat dimana jika tingkat kepeduliannya tinggi maka tinggal diperlukan tindak lanjut keputusan yang dapat diterima dan berlaku umum.